

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU

(Yuheldi 0812111006, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 125 halaman)

ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan unuk menjadi sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan hukum dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, diperlukan partisipasi atau keikut sertaan masyarakat, baik itu dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya. Adapun masalah pokok yang diajukan dalam thesis ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?, Bagaimanakah hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?, Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?. Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan penelitian hukum empiris dan dari sudut sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hambatan yaitu: kualitas sumber daya manusia, kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya dalam mengatasi hambatan adalah lebih meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan Narapidana menjadi tepat sasaran. Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana agar tepat sasaran.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

The Patterns of Rehabilitation Implemented by The Rehabilitation Institution by Prisoners Class IIA of Pekanbaru

ABSTRACT

Rehabilitation system in spite of intending to return the prisoners to be better ones also aimed at protecting the people from any possible criminal recurrence by the prisoners. It is an implementation and integral part of values contained in Ideology of Pancasila. In order to implement their habilitation system, participation and involvement of community is also required either by a cooperation in rehabilitation or acceptance of the prisoners who have undergone their punishment. For that purpose, the problems presented in the present study included: How did the patterns of rehabilitation implemented by the Rehabilitation Institution Class IIA of Pekanbaru, What factors strain in implementing the rehabilitation Pekanbaru, What efforts made by the Rehabilitation Institution of Class IIA Pekanbaru in dealing with the constraints for implementation of better rehabilitation. The present study is a descriptive analysis describing all the phenomena and facts and the problems at hand. Viewed in terms of the approaches, the study stems from the problems based on the actual fact. The study used a normative juridical approach by making an assessment and analysis of the problems facing the rehabilitation of the prisoners in Rehabilitation Institution of Class IIA Pekanbaru viewed in terms of the Laws No. 12 of 1995 regarding Rehabilitation and the other Rules related to Prisoners and Rehabilitation Institution. The result of the study showed that the rehabilitation in Rehabilitation Institution of Class II A Pekanbaru has been adjusted to the Ministerial Decree of Justice of Indonesia No M.02-PK.04.10 of 1990 regarding the Rehabilitation Pattern of Prisoners and the Laws No. 12 of 1995 regarding rehabilitation. In fact, however, the implementation was still not optimally conducted due to some factors; inadequate quality of human resources, the lack of cooperation with other third parties and inadequate facilities and equipment. For that reason, it is suggested that the Rehabilitation Institution of Class II A Pekanbaru may improve the human resources of the officials by involving them in various types of training and education and implement the rehabilitation optimally in compliance with the prevailing rules in The Directorate General of Rehabilitation and it is expected that the central department to enact special rules to govern the rehabilitation of the arrests and prisoners as targeted.

Keywords: Pattern of Rehabilitation, Prisoners, Rehabilitation Institution Pekanbaru.